

PEMBERITAAN MEDIA

EDISI
6 – 12 Juli 2020

LULUK'S UPDATE

*MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULİYAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI*

Pembayaran Dana Perubahan Iklim

Pembayaran Dana Perubahan Iklim Norwegia Kepada Indonesia

- Norwegia untuk pertama kalinya akan membayar 530 juta Krona Norwegia atau sekitar Rp 812,86 miliar (56 juta Dolar) kepada Indonesia atas keberhasilannya menurunkan emisi karbon.
- Pengumuman pembayaran itu dirilis di laman resmi Pemerintah Norwegia pada 3 Juli 2020.
- Uang itu merupakan pembayaran berbasis hasil sebagaimana isi kerja sama Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+)
- Indonesia dan Norwegia telah menjalani kerja sama di sektor lingkungan hidup dalam 10 tahun terakhir. Lewat kerja sama REDD+, Pemerintah Norwegia pada 2010 mengalokasikan dana total enam miliar Krona Norwegia atau sekitar Rp9,2 triliun kepada Pemerintah Indonesia jika berhasil menurunkan kadar gas buang karbon.

- Norwegia akan membayarkan **Rp812,86 miliar** pada tahun ini karena hasil verifikasi pihak ketiga menunjukkan Indonesia berhasil menurunkan emisi sebesar **11,2 juta ton CO₂eq** selama 2016-2017. Saat ini, harga pasar karbon dunia sebesar Rp72.617 per ton (5 dollar AS).
- Angka **11,2 juta ton CO₂eq** diperoleh setelah verifikator mengurangi 35 persen dari keseluruhan emisi yang berhasil dikurangi Indonesia, yaitu 17 juta ton CO₂. Pengurangan itu dilakukan sebagai kompensasi terhadap beberapa risiko dan ketidakpastian situasi iklim saat penghitungan.
- Menurut Pemerintah Norwegia, 17 juta ton emisi karbon yang berhasil dikurangi Indonesia selama 2016-2017 setara dengan sepertiga dari gas buang karbon yang dihasilkan Norwegia selama satu tahun.

- Dana Rp 812,86 miliar yang akan diterima Pemerintah Indonesia akan disalurkan ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), lembaga yang terbentuk pada 2019 dan efektif beroperasi sejak Januari 2020.
- Pemerintah Norwegia menyebut pencapaian Indonesia itu mendukung pengendalian dampak perubahan iklim dan pemanasan global.
- Pemerintah Norwegia menyampaikan pihaknya berkomitmen membayar hasil penurunan emisi Indonesia pada tahun-tahun berikutnya, sesuai komitmen yang disampaikan pada tahun 2010 yakni sebesar 6 miliar NOK.

Pemerintah Norwegia dan Indonesia bekerja sama untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan dan kehilangan lahan gambut, melalui Letter of Intent yang ditandatangani pada 26 Mei 2010. Kerja sama itu terbagi dalam 3 fase.

- **Fase I adalah fase persiapan (2011-2013).**

Fase I ini merupakan tahapan untuk mengembangkan Strategi Nasional REDD+ yang dibarengi dengan rencana aksi, kebijakan dan pembangunan kapasitas.

Sebelum memasuki fase 2, terdapat fase interm (tahun 2013 – 2016) guna mempersiapkan perangkat pelaksanaan REDD+.

- **Fase II, yaitu fase transformasi (2017-2020).**

Tahap ini difokuskan pada peningkatan kapasitas, pengembangan kebijakan dan implementasinya.

- **Fase III, yaitu fase implementasi penuh (setelah 2018).**

Pada fase ini diterapkan pembayaran berbasis kinerja yang telah terverifikasi dan tetap mendukung peningkatan kapasitas serta pengembangan kebijakan.

Perubahan Iklim

Presiden Meminta Tahapan Penurunan Gas Rumah Kaca Segera Diselesaikan

- Pada 6 Juli 2020 dilaksanakan Rapat Terbatas dengan tema '**Kelanjutan Kerja Sama Penurunan Emisi GRK Indonesia-Norwegia dan Kebijakan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (Carbon Pricing)**'.
Sama Penurunan Emisi GRK Indonesia-Norwegia dan Kebijakan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (Carbon Pricing)'.
- Dalam pembukaannya, Presiden meminta agar seluruh tahapan proses penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dapat segera diselesaikan. Termasuk urusan instrumen pendanaan dan insentif bagi pemangku kepentingan.
- Berdasarkan konferensi perubahan iklim yang sudah diratifikasi, Indonesia memiliki target penurunan emisi GRK sebesar 29 persen pada 2030. Indonesia punya kewajiban untuk penurunan emisi karbon di sektor kehutanan sebesar 17,2 persen, sektor energi 11 persen, limbah 0,32 persen, sektor pertanian 0,13 persen, dan sektor industri serta transportasi 0,11 persen.

- Selain itu, Presiden juga meminta program pemulihan lingkungan seperti perlindungan gambut dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan terus dilanjutkan. Presiden juga mengingatkan agar terus mewaspadaai kebakaran hutan dan lahan. Terlebih di saat mulai memasuki musim panas.
- Upaya lain seperti perlindungan biodiversitas yang sudah melekat sebagai upaya perlindungan hutan dan pemulihan habitat harus dipastikan betul-betul berjalan di lapangan.
- Serta pengembangan biodiesel B30, B50, dan akan ke B100, pengembangan energi surya, energi angin agar terus dilanjutkan

Pengaturan Nilai Ekonomi Karbon (Carbon Pricing)

- Dalam Ratas tersebut, Menteri LHK melaporkan kepada Presiden terkait kepentingan pemerintah mengatur tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK)/Carbon Pricing dengan sebuah kebijakan resmi.
- Kebijakan pemerintah dalam pengaturan NEK ini akan mendukung upaya penanggulangan perubahan iklim yang sedang dilakukan Indonesia bersama masyarakat dunia.
- Kebijakan pengaturan Instrumen NEK akan menjadi landasan legal yang kuat dalam rangka mencapai target NDC Indonesia serta untuk mendukung pembangunan rendah karbon.
- Potensi karbon Indonesia sangat besar. Jika dibarengi dengan ketersediaan landasan legal Indonesia menetapkan NEK, maka akan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- Kebijakan pengaturan NEK ini diusulkan Menteri LHK berbentuk Perpres yang memuat pengaturan penyelenggaraan NEK, termasuk mekanisme perdagangan karbon (cap and trade dan carbon offset), Result Based Payment (RBP) dan Pajak atas karbon, serta upaya pencapaian target NDC (Mitigasi dan adaptasi) yang terkait dengan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan pembentukan Instrumen Pengendalian dan Pengawasan (MRV, SRN, Sertifikasi).
- Jika Perpres ini telah disetujui maka KLHK akan mampu menyusun roadmap ekonomi karbon untuk jangka panjang.
- Saat ini perdagangan karbon sudah dibahas di tingkat Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Luas Tutupan Hutan Indonesia

- Menteri LHK menjelaskan saat ini **luas tutupan hutan daratan Indonesia** mencapai 94,1 juta ha, dengan luas tutupan dominan di Sumatera sebesar 13,5 juta ha, Kalimantan sebesar 26,7 juta ha, dan Papua sebesar 34 juta ha.
- **Kawasan hidrologis gambut** Indonesia sangat luas, yaitu di Sumatera dan Riau seluas berturut-turut 9,60 juta ha dan 5,36 juta ha, di Kalimantan dan Kalteng berturut-turut seluas 8,40 juta ha dan 4,68 juta ha.
- Untuk **mangrove**, Indonesia pun punya potensi sangat besar, seperti di Sumatera luas mangrove 666,4 ribu ha, Kalimantan seluas 735,8 ribu ha, Jawa seluas 35,9 ribu ha, Sulawesi seluas 118,8 ribu ha, Maluku seluas 221,5 ribu ha, Papua seluas 1,49 juta ha dan Bali Nusa Tenggara seluas 34,7 ribu ha.

Kandungan Carbon dari Hutan

- Dengan perhitungan rata-rata kandungan karbon dari hutan (dari aboveground biomass) sebesar 200 ton C/ha dan rata-rata kandungan karbon dari mangrove (termasuk soil karbon) adalah 1.082,6 ton C/ha, serta rata-rata karbon gambut 460 ton C/ ha, dan hutan gambut primer mencapai 1385,2 ton C/ha, ***maka jika hutan Indonesia ini dikelola dengan baik dan dicegah dari kerusakan*** akan didapat nilai ekonomi yang sangat besar. Dengan adanya landasan peraturan tentang NEK, potensi ini akan dihitung nilai ekonomi karbonnya.

Pembayaran dari Norwegia

- Atas keberhasilan Indonesia menekan laju deforestasi dan degradasi hutan tahun 2016/2017, untuk pertama kalinya Indonesia akan menerima pembayaran hasil kerja/RBP penurunan emisi GRK dari Norwegia sebesar proyeksi 56 juta US\$ atau lebih dari 840 milyar rupiah, yang merupakan bagian dari komitmen kerjasama pendanaan iklim melalui komitmen nota kesepakatan (letter of intent/LOI) pada 2010.
- Setelah pembayaran RBP pertama tersebut akan dilaksanakan pembayaran karbon untuk RBP berikutnya atas prestasi kerja tahun 2017/2018 dan seterusnya, yang akan diserahkan Norwegia kepada Indonesia melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Penanganan Deforestasi

- Pada Ratas tersebut, Menteri LHK melaporkan bahwa penanganan deforestasi harus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi Indonesia, dan perlindungan sasaran pembangunan nasional Indonesia, sedangkan metode yang dipakai harus didasarkan pada SNI yang telah ada, dengan mengakomodasikan berbagai kepentingan nasional.
- Standar yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia tahun 2014
- Jadi, analisis jenis-jenis tutupan lahan seperti semak, hutan primer, hutan sekunder, semak belukar dan lain-lain mengikuti standar SNI, termasuk dalam menghitung deforestasi

- Presiden meminta agar Indonesia harus terus konsisten menjalankan program pemulihan lingkungan untuk menurunkan gas rumah kaca, juga perlindungan gambut dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan biodiversity yang sudah melekat sebagai upaya perlindungan hutan dan pemulihan habitat harus dipastikan betul-betul jalan di lapangan.
- Presiden juga menekankan agar kejadian Karhutla harus diantisipasi sebaik mungkin dengan kerjasama yang baik semua pihak.

- Seusai rapat terbatas, Menteri Siti langsung melakukan rapat internal bersama Wamen dan jajaran Eselon 1 dan 2 terkait lingkup KLHK
- Beberapa hal penting yang disampaikan Menteri Siti antara lain tahapan sistematis penyelesaian regulasi nilai ekonomi karbon, pembangunan pembibitan mangrove modern dengan kapasitas jutaan bibit, percepatan program TORA dan Perhutanan Sosial, dan publikasi rinci program pengembangan pangan nasional di areal bekas PLG Kalimantan Tengah.

Pencapaian Target Emisi GRK

Target Emisi Gas Rumah Kaca Tercapai Jika tak Ada Karhutla

**Ruandha Agung
Sugardiman
Dirjen PPI KLHK**

- Dirjen PPI KLHK optimistis target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia akan tercapai di 2030 jika areal gambut tidak terbakar.
- Presentase penurunan emisi hingga 2018 sangat baik.
- Sayangnya, angkanya kembali terkoreksi dengan adanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 2019. Jika areal gambut dapat dijaga sehingga tidak terbakar dan melepaskan karbon begitu besar maka target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia sesuai dengan Paris Agreement untuk menurunkan emisi GRK 29 persen dengan upaya sendiri atau 41 persen dengan bantuan internasional di 2030 akan tercapai.

**Ruandha Agung
Sugardiman
Dirjen PPI KLHK**

- Untuk mencegah karhutla kembali terjadi di area gambut di 2020, KLHK melakukan pencegahan dengan menganggarkan pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau lebih dikenal masyarakat dengan hujan buatan. Harapannya dengan membuat lahan gambut terendam air maka tidak terjadi karhutla lagi.
- Berdasarkan data Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (ha) Per Provinsi di Indonesia dari situs SiPongi, karhutla 2019 mencapai 1.649.258 hektare (ha), sedangkan di 2017 total karhutla mencapai 165.483,92 ha.

Mahawan Karuniasa
Direktur Environment
Institute

- dari lima sektor yang tercantum dalam NDC Indonesia, antara lain energi, limbah, industri, agrikultur, kehutanan, maka sektor kehutanan menjadi yang paling tidak stabil dalam hal penurunan emisi. Terutama jika terjadi karhutla.
- Jika 2030 kondisi karhutla sama seperti di 2017, target NDC Indonesia akan tercapai. Namun apabila kebakaran hutan dan lahan besar terjadi seperti di 2015 dan 2019 maka target penurunan emisi GRK tidak akan tercapai. Jadi sektor kehutanan penentu.
- Kemungkinan besar target penurunan emisi dari sektor energi akan tercapai di 2030. Sebab, setelah pandemi COVID-19 kondisi ekonomi akan bergerak bertahap untuk bisa ke posisi normal. Hal tersebut berkorelasi dengan konsumsi energi.

Pembangunan Rendah Karbon

Update Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (LCDI) di Kaltara

- Pemerintah Norwegia melalui United Nations Development Programme (UNDP) memberikan dana kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 350.000 USD atau sekitar Rp 4,7 miliar.
- Selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemprov Kaltara melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara bersinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltara

Update Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (LCDI) di Kaltara

Sinergi tersebut untuk memenuhi beberapa strategi untuk mewujudkan kebijakan pembangunan rendah karbon pada RPJMN 2020-2024 mencakup;

- 1. Pembangunan Energi Berkelanjutan;
- 2. Pemulihan Lahan Berkelanjutan;
- 3. Penanganan Limbah;
- 4. Pengembangan Industri Hijau;
- 5. Pemulihan Ekosistem Pesisir dan Kelautan.

- Bantuan ini tidak diberikan secara tunai. Melainkan berupa pendampingan, pengawasan, hingga menyiapkan tenaga ahli untuk membantu menjalankan beberapa program yaitu, pengelolaan lahan gambut, limbah, hingga konservasi hutan mangrove
- Untuk tahun ini, bantuan tersebut dipergunakan untuk kegiatan perencanaan (window A) yang mencakup Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (Low Carbon Development Initiative/LCDI). Ditargetkan pada September ini, pembangunan rendah karbon bisa segera direalisasikan (window B).
- Pembangunan rendah karbon ini diperlukan untuk meminimalkan risiko dari dampak-dampak negatif perubahan iklim. Selain itu, pembangunan rendah karbon juga bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial.

- Pembangunan Rendah Karbon pengelolaannya dilakukan melalui mitra yang ditunjuk oleh Sekretariat Governor's Climate and Forest (GCF), yaitu
 - Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN),
 - The Nature Conservancy (TNC).

Dengan alur, negara mendonorkan dana ke UNDP kemudian Sekretariat GFC menunjuk mitra yang sesuai atas usulan dari Pemprov sendiri.

Dan, mulai tahun ini bantuan tersebut dikelola oleh organisasi non profit Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) setelah sebelumnya dikelola oleh World Widelife Fund (WWF).

Pelaksanaan Program Strategis KLHK

Laporan Pelaksanaan Program Strategis KLHK

- Pada 8 Juli 2020 Menteri LHK menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI. Pada Raker ini, disampaikan perkembangan capaian pelaksanaan program strategis KLHK terkait dampak pandemi Covid-19 dan isu-isu aktual.

Penjelasan Menteri LHK di Raker tersebut antara lain:

- upaya KLHK dalam penanganan limbah infeksius akibat kegiatan penanganan Covid-19 meliputi penyediaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan sosialisasi pengolahan limbah B3 infeksius Covid-19 dari fasyankes.
- kegiatan pengamanan hutan meliputi pencegahan karhutla, illegal logging, perambahan kawasan, dan perburuan satwa liar serta konflik satwa.
- menjaga produktivitas dan memulihkan ekonomi masyarakat menjadi prioritas utama KLHK dalam merumuskan kebijakan di tengah pandemi Covid-19

- Pembangunan ekonomi produktif bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dilakukan melalui dukungan kegiatan PDASHL berbasis padat karya, perhutanan sosial, dan pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
- melakukan relaksasi kebijakan fiskal sektor usaha kehutanan, penerapan multi usaha kehutanan, dan sirkular ekonomi pengelolaan sampah.

Isu-isu aktual yang dibahas pada Raker ini diantaranya:

- biopiracy (pencurian sumber daya hayati) tumbuhan dan satwa liar Indonesia,
- pencemaran dan kerusakan lingkungan,
- penegakan hukum,
- konflik tenurial dan Hutan Adat.

Ketua Komisi IV DPR menyampaikan:

- agar KLHK melakukan percepatan realisasi APBN Tahun 2020. Ini diperlukan untuk pelaksanaan tugas percepatan penanggulangan dampak Pandemi COVID-19. Disamping tugas pokok menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup serta mengelola dan melestarikan hutan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Komisi IV mendorong KLHK agar pelaksanaan kegiatan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masing-masing provinsi, dapat didukung melalui pelimpahan Dana Dekonsentrasi.
- Komisi IV akan membantu mendorong alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Badan Anggaran DPR.
- Untuk mencegah penyelundupan tumbuhan dan satwa liar, Komisi IV mendorong KLHK untuk melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Komisi IV mendorong agar petugas KLHK juga terlibat dalam penyelenggaraan karantina tumbuhan dan hewan langka dilindungi, pada setiap pintu pemasukan dan pintu pengeluaran satwa liar di seluruh wilayah Indonesia.
- Komisi IV mendorong KLHK untuk menyusun program konseptual dan terpadu untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta kegiatan pencegahan dan penanggulangan illegal logging.
- Komisi IV menekankan agar ada solusi untuk permasalahan biopiracy.
- Komisi IV meminta KLHK bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menertibkan pemberian izin keluar masuk peneliti luar negeri ke dalam Kawasan Hutan yang memiliki sumber daya hayati serta kearifan lokal. Selain itu, tidak dibenarkan membawa keluar sampel penelitian dalam bentuk apapun tanpa izin.

Raker juga membahas tindak lanjut atas aspirasi masyarakat:

- Komisi IV meminta KLHK untuk melakukan kajian atas izin pengelolaan Wisata Kampung Adat Baduy di Provinsi Banten. Mengingat adanya kekhawatiran akan terganggunya kearifan lokal Masyarakat Hutan Adat Baduy.
- Pemindahan Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dari Kota Medan ke Kota Banda Aceh. Komisi IV mendorong KLHK agar segera menetapkan dan merealisasikan hal tersebut.

Realisasi Anggaran KLHK Masih 31,55 persen

- Capaian kinerja KLHK terkait dengan realisasi anggaran pada 2020 masih tergolong rendah, yaitu 31,55 persen, setara Rp2,1 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp6,7 triliun. Capaian ini berada di urutan ke-63 dari 85 K/L
- Komisi IV meminta penjelasan terkait upaya serta langkah yang akan dilakukan oleh KLHK untuk meningkatkan capaian realisasi kinerja pada sisa tahun anggaran.
- Menteri LHK mengatakan perkembangan dan evaluasi keuangan KLHK per 6 Juni 2020, sebesar 31,5 persen, namun pada 8 Juli 2020 naik menjadi 32,11 persen berdasarkan data Kementerian Keuangan.
- Ada kemajuan dan langkah-langkah percepatan sedang dilakukan karena baru saja dilonggarkan di KPKN
- Diperkirakan pada awal dan pertengahan Agustus 2020 sudah bisa mencapai 49 persen. Apabila proses pengadaan barang dan jasa sudah berjalan, perkembangannya akan lebih cepat.

Sumber Berita

- <https://nasional.tempo.co/read/1361823/jokowi-minta-tahapan-penurunan-gas-rumah-kaca-segera-diselesaikan>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-minta-target-pencegahan-perubahan-iklim-dijalankan-dengan-serius>
- <https://nasional.tempo.co/read/1361823/jokowi-minta-tahapan-penurunan-gas-rumah-kaca-segera-diselesaikan>
- <https://www.medcom.id/foto/news/0k80pggk-presiden-targetkan-emisi-gas-rumah-kaca-turun-26-persen>
- <https://news.detik.com/berita/d-5081904/jokowi-penurunan-emisi-karbon-harus-konsisten-hati-hati-musibah-karhutla>
- <https://mitrapol.com/2020/07/11/dapat-bantuan-47-m-dari-undp-pemprov-kaltara-targetkan-lcdi-teralisasi-september/>
- <https://www.medcom.id/nasional/politik/wkBYwReb-pemerintah-lanjutkan-pembahasan-perdagangan-karbon>
- <http://kabarpolitik.com/menteri-lhk-pemerintah-dorong-pembangunan-rendah-karbon/>
- <https://dnaberita.com/2020/07/07/pemerintah-dorong-pembangunan-rendah-karbon/>
- <https://biz.kompas.com/read/2020/07/09/183450928/menteri-lhk-sampaikan-laporan-pelaksanaan-program-strategis-klhk-di-raker-komisi>
- <https://www.jpnn.com/news/indonesia-optimistis-bisa-mencapai-target-mengurangi-emisi-grk?page=2>
- <https://biz.kompas.com/read/2020/07/07/143901528/menteri-lhk-presiden-setuju-segera-diatur-nilai-ekonomi-karbon>
- <https://rmco.id/baca-berita/government-action/40275/ratas-dengan-klhk-presiden-setuju-nilai-ekonomi-karbon-diatur>
- <https://www.beritasatu.com/nasional/653129/siti-nurbaya-presiden-setuju-segera-diatur-nilai-ekonomi-karbon>
- <https://detak.co/detail/berita/menteri-lhk-pemerintah-dorong-pembangunan-rendah-karbon>
- <https://www.medcom.id/ekonomi/sustainability/5b2X9GvK-presiden-setuju-atur-nilai-ekonomi-karbon-dengan-kebijakan>
- <https://www.beritasatu.com/lingkungan/653129/siti-nurbaya-presiden-setuju-segera-diatur-nilai-ekonomi-karbon>
- <https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/233862-pemerintah-segera-atur-nek-dengan-kebijakan-resmi-turunkan-emisi-karbon>
- <https://www.law-justice.co/artikel/89098/menteri-klhk-dorong-pembangunan-rendah-karbon/>
- <https://news.okezone.com/read/2020/07/09/1/2243764/raker-komisi-iv-dpr-menteri-lhk-sampaikan-laporan-pelaksanaan-program-strategis-klhk>
- <https://www.antaraneews.com/berita/1597598/dipertanyakan-realisis-anggaran-klhk-masih-3155-persen>

Sumber Berita

- <https://intisari.grid.id/read/032230512/mantap-berhasil-turunkan-emisi-karbon-tahunan-indonesia-dapat-bayaran-813-miliar-rupiah-dari-norwegia-mari-kita-jaga-lingkungan?page=all>
- <https://star.grid.id/read/452236992/menjadi-sorotan-dunia-indonesia-bakal-terima-bayaran-rp-813-miliar-dari-norwegia-gegara-prestasi-membanggakan-ini-jokowi-beri-himbauan?page=all>
- <https://pop.grid.id/read/302237403/torehkan-prestasi-turunkan-emisi-karbon-indonesia-dipuji-dunia-hingga-bakal-terima-uang-rp-8133-miliar-dari-norwegia>
- <https://padek.jawapos.com/nasional/08/07/2020/norwegia-lakukan-pembayaran-perdagangan-karbon-usd-56-juta/>
- <https://manado.tribunnews.com/2020/07/07/indonesia-dapat-bayaran-rp-813-miliar-dari-norwegia-gara-gara-emisi-karbon>
- <https://www.kompas.com/global/read/2020/07/06/114321470/pemerintah-norwegia-bayar-56-juta-dollar-as-kepada-indonesia-untuk-emisi?page=all#page2>
- <https://bangka.tribunnews.com/2020/07/08/kabar-gembira-turunkan-emisi-karbon-indonesia-bakal-dibayar-rp-813-miliar-oleh-norwegia>
- <https://sumsel.antaranews.com/berita/483034/norwegia-untuk-pertama-kalinya-bayar-rp81286-miliar-ke-indonesia-karena-berhasil-turunkan-emisiberkomitmen-membayar-hasil-penurunan-emisi-Indonesia-pada-tahun-tahun-berikutnya>
- <https://www.antaranews.com/berita/1591854/norwegia-bayar-rp81286-m-ke-indonesia-karena-berhasil-turunkan-emisi>
- <https://katadata.co.id/berita/2020/07/05/norwegia-bayar-rp-812-86-miliar-ke-ri-karena-turunkan-emisi-karbon>
- <https://jambi.tribunnews.com/2020/07/07/norwegia-beri-56-juta-dollar-pada-indonesia-setara-813-miliar-rupiah-terkait-perubahan-iklim>
- <https://jambi.tribunnews.com/2020/07/07/norwegia-beri-56-juta-dollar-pada-indonesia-setara-813-miliar-rupiah-terkait-perubahan-iklim?page=2>
- <https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/sukses-turunkan-emisi-karbon-indonesia-dapat-rp784-miliar>
- <https://republika.co.id/berita/qdb53t368/klhk-yakin-target-emisi-tercapai-jika-tak-ada-karhutla>
- https://sumsel.antaranews.com/nasional/berita/1605146/klhk-optimistis-penurunan-emisi-tercapai-jika-gambut-tidak-terbakar?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews

LULUK'S UPDATE

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULIAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**

**SETIAP SENIN
9.00 – 9.30 WIB**



@madaniberkelanjutan.id

Madani

